

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Bab II ini akan membahas tentang: (1) Kajian Teoretis, (2) Landasan Teori, (3) Penelitian Terdahulu, (4) Karangka Konsep

2.1 Kajian Teoretis

A. Pendidikan Politik

Pendidikan politik yang bersifat dialogis, terbuka, rasional atau penyadaran merupakan metode untuk mempelajari politik. Dalam lingkungan sekolah, melalui PKn dengan tujuannya yaitu untuk menumbuhkan “*Good Citizenship*” sehingga anak atau siswa tersebut berguna dan bermanfaat untuk bangsanya. Membaca buku teks, mengikuti perkembangan lewat media masa elektronidan non-elektronik, merupakan cara yang dilakukan untuk memperoleh informasi politik.

Pembelajaran politik yang lebih mengemukakan pengarahan politik untuk Dukungan penguasa politik atau memobilisasi dan memanipulasi masyarakat dari pada meningkatkan partipasi politik, mengutamakan pembakitan emosi dan lebih bersifat monolog bukan dialog merupakan indoktrinasi politik, sangat berbeda dengan pendidikan politik. Indoktrinasi politik sering dilakukan oleh partai politik maupun suatu rezim otoriter. (Cholisin, 2002:6)

Menurut Kartini (2009:65) Pendidikan politik adalah kegiatan pendidik diri yang dilakukan secara berkelanjutan, guna memahami yang ada pada dirinya serta lingkungan sekitar.

Penjelasan beberapa ahli diatas dapat diartikan pendidikan politik pada dasarnya memiliki tujuan untuk mendidik masyarakat agar melek terhadap politik dan dewasa dalam menentukan pilihan politik serta resiko-resiko dari setiap pengambilan keputusan (mengatur dan mendidik diri sendiri)

Kedudukan pendidikan politik sangatlah strategis guna meningkatkan pengetahuan politik bagi masyarakat akan politik. Pendidikan politik merupakan metode dalam melibatkan rakyat dalam system politik melalui partisipasi dalam menyalurkan tuntutan dalam dukungannya. Rasadi (1988:54) berpendapat bahwa pendidikan politik adalah fungsi struktur politik dengan tujuan meningkatkan pengetahuan politik rakyat agar dapat berpartisipasi dalam system politik.

Brownhill dan Smart (1989:10), Pendidikan politik berguna dalam membimbing siswa dalam menilai, memahami, dan mengambil keputusan dalam berbagi masalah secara rasional dan tepat, baik itu isu yang controversional maupun masalah yang bias.

Crick & Porter (dalam Affandi, 1996) Masyarakat yang paham atau mengetahui tentang politik apabila dapat memahami tentang:

1. Memanfaatkan pengetahuan dan melibatkan diri secara aktif
2. Informai bagaimana sebuah institusi bekerja
3. Mampu memprediksi sebuah isu dan memetuskan secara efektif
4. Dapat menilai suatu kebijakan secara baik ketika masalah (isu) dipecahkan
5. Melek politik dalam hal ini dapat melihat pandangan orang lain dengan berbagai sudut pandang.

Seseorang dikatakan melek politik jika ia mampu secara aktif dalam berpartisipasi secara aktif dalam politik dan tidak hanya sebagai penonton. Keberhasilan pendidikan politik yang dianalisis oleh Alfian yaitu system politik yang ideal atau yang diinginkan dari masyarakat itu sendiri.

Pemerintah seyogyanya melakukan pendidikan politik agar mampu melahirkan masyarakat yang cerdas, aktif dan inisiatif dalam berpartisipasi. Pendidikan politik tidak hanya diajarkan disekolah saja, setidaknya terdapat empat (4) komponen yang bertanggung jawab dalam melaksanakan pendidikan politik yaitu penyelenggara pemilu (KPU dan Panwaslu), partai politik, pers dan masyarakat.

Alfian (1986:235), Pendidikan politik ialah usaha sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat agar memahami dan menghayati nilai-nilai politik yang dicita-citakan. Pengetahuan dan keahlian diperlukan untuk diberikan kepada peserta didik sebagai pegangan untuk dapat berpartisipasi secara sukses dalam politik yang dilakukan oleh pendidik politik. Politik bukan hanya meraih beberapa tujuan atau kekuatan tapi menyangkut tentang nilai dan cara menghormati martabat manusia.

Intruksi presiden No. 12 Tahun 1982: "Pendidikan politik merupakan rangkaian usaha untuk meningkatkan dan memantapkan kesadaran politik dan kenegaraan guna menunjang kelestarian Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 sebagai budaya politik bangsa".

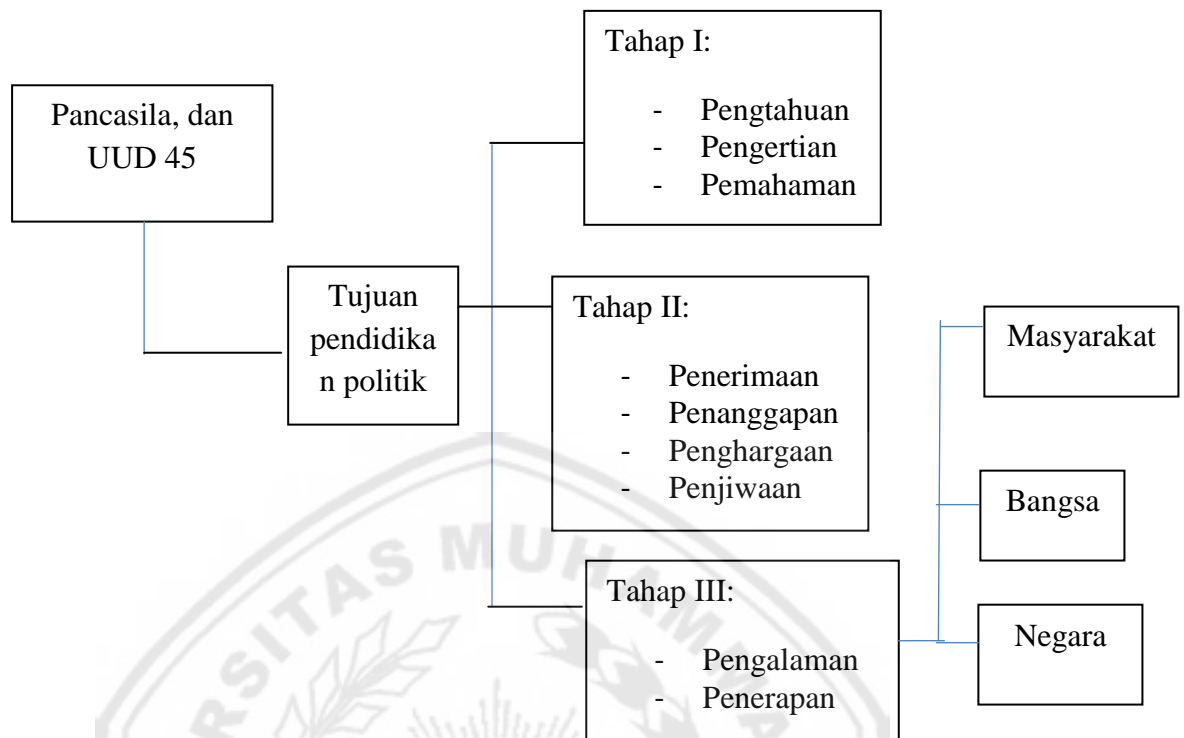
Pendidikan politik juga harus merupakan bagian proses perubahan kehidupan politik bangsa Indonesia yang sedang dilakukan dewasa ini dalam

rangka usaha menciptakan suatu sistem politik yang benar-benar demokratis, stabil, efektif, dan efisien”. Dapat disimpulkan pendidikan politik adalah proses penurunan nilai-nilai dan norma-norma dasar ideologi suatu negara yang dilakukan dengan sadar, terorganisir, dan berencana dan berlangsung kontinyu dari satu generasi kegenerasi berikutnya dalam rangka membangun watak bangsa (national character building). Sumantri dan Afandi (1996:126) berpendapat bahwa, diselenggarakan pendidikan politik pada dasarnya ialah untuk memberikan pedoman bagi generasi muda Indonesia guna meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara sesuai dengan arah dan cita-cita bangsa Indonesia.

Melalui kegiatan pendidikan politik diharapkan warga negara memahami akan hak dan kewajiban serta bertanggung jawab berdasarkan nilai-nilai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, berkepribadian utuh, terampil berkesadaran tinggi sebagai warga negara yang baik. Pendidikan politik berhubungan dengan sikap dan perilaku seseorang maka dari itu proses ini memerlukan waktu yang lama.

Brownhill (1989:4), pendidikan politik adalah tinjauan terbatas dan berkelanjutan mengenai institusi dan kehidupan sehari-hari serta pendekatan pada moral.

Gambaran umum mengenai pendidikan politik yang dapat dicapai, berikut merupakan tahapan-tahapannya:



Sumber : (Brownhill, 1989: IV)

Tahapan pertama sering dinamakan *cognitive morality* merupakan tahapan yang paling rendah atau dengan kata lain mudah dicapai, memiliki pengetahuan yang berkaitan dengan kesadaran politik.

Tahap kedua atau tahap terakhir terkait dengan masalah sikap (afektif), yang berhubungan dengan tindakan atau masalah perilaku setelah orang tersebut mendapatkan pendidikan politik.

Sumantri (2003: 3) berpendapat bahwa partisipasi dalam pemilu, tergabung dalam organisasi politik atau kemasyarakatan, aktif dalam pembangunan nasional, dan perilaku-perilaku lain yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Hal yang dikemukakan oleh Sumantri merupakan suatu kemajuan dan keberhasilan pendidikan politik dan mencerminkan kedewasaan politik bagi generasi muda.

Secara alamiah tujuan pendidikan politik terus berlangsung dan berjalan dalam masyarakat melalui berbagai macam interaksi sosial (transformasi nilai), transformasi akan dapat membuat masyarakat dapat menilai baik atau buruk. Selain itu tujuannya adalah untuk memberikan pengertian tentang politik agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam sistem politik yang sedang berjalan secara bertanggung jawab sebagai warga negara. Pendidikan politik merupakan bagian dari mengenal, mengetahui dan memahami sistem dan nilai-nilai politik yang mempengaruhi perilaku warga negara.

Sistem pendidikan politik yang berkualitas bisa dijadikan sebagai tolak ukur majunya suatu bangsa. Hal ini dikarenakan pendidikan politik merupakan suatu prinsip dan pokok dalam menopang pembangunan bangsa. Selain itu juga, pendidikan politik berfungsi sebagai rangkaian usaha untuk meningkatkan kesadaran politik untuk mempersiapkan generasi bangsa yang lebih baik dan kenegaraan warga negara guna menunjang keutuhan negara sebagai budaya bangsa.

Pada hakekatnya pendidikan politik yaitu suatu bentuk yang dijadikan sebagai wadah dalam menjadikan manusia yang utuh menjaga nilai-nilai, norma-norma dan kaidah agar berbudaya baik dalam peradaban maupun dalam berideologi. Untuk menumbuhkan kembangkan tatanan politik dalam rangka pembangunan politik, jalur alternatif yang dinilai paling efektif dan tepat yaitu dengan melaksanakannya melalui jalur pendidikan guna meningkatkan kecerdasan rakyat. Pendidikan politik diharapkan akan mampu menciptakan/tercapainya stabilitas nasional sebagai perwujudan cita-cita proklamasi kemerdekaan.

B. Partisipasi Politik

Apek terpenting dalam dalam tatanan negara demokrasi ialah partisipasi politik, dan ini juga merupakan salah satu ciri khas dari modernisasi politik. Modernisasi politik yang dilaksanakan dengan baik di beberapa negara dinilai dapat meningkatkan partisipasi politik warga negara tersebut.

Menurut Sastoadmojo (1995:67) menjelaskan bahwa partisipasi politik ialah suatu kegiatan yang melibatkan warga negara untuk mempengaruhi pemerintah dalam setiap pengambilan keputusan.

1. Pengertian partisipasi politik

Partisipasi politik adalah keikutsertaan secara langsung maupun tidak langsung warga negara dalam mengambil keputusan politik yang dilakukan oleh pemerintah yang di dalamnya menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga masyarakat itu sendiri dengan memilih pemimpin-pemimpin politik secara tepat guna membentuk kebijakan umum.

Huntington dan Nelson (1994:6) berpendapat bahwa partisipasi politik adalah kegiatan warga negara dalam mempengaruhi keputusan yang dilakukan pemerintah. Partisipasi dilakukan secara damai/kekerasan, legal/illegal, terorganisir, efektif/tidak efektif dan bisa bersifat individual atau kolektif (Budiarjo, 2008:3).

Beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan partisipasi politik yaitu keikutsertaan suatu kelompok maupun individu dalam proses kegiatan politik (positif dan negatif) guna mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam pembuatan keputusan. Adapun Konsep partisipasi politik demokrasi negara yaitu dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Artinya kedaulatan ada

ditangan rakyat, masa depan rakyat pemegang kekuasaan (pemimpin) ditentukan oleh rakyat itu sendiri.

2. Bentuk-bentuk partisipasi politik

Aktivitas-aktivitas seseorang dalam berpolitik dapat dikatakan sebagai bentuk partisipasi politik. Bentuk partisipasi politik yang paling umum dikenal ialah melalui pemungutan suara atau voting (Maran, 2001:148). Bentuk-bentuk partisipasi politik sebagai berikut:

- a. Menjadi anggota aktif dan pasif dalam suatu organisasi politik
- b. Menjadi anggota aktif dan pasif dalam suatu organisasi semi politik
- c. Partisipasi dalam rapat umum, demonstrasi, dsb
- d. Berpartisipasi dalam diskusi politik internal
- e. Partisipasi dalam pemungutan suara

Menurut Sastoatmodjo (1995:77), Berdasarkan pelaku Bentuk partisipasi politik dibagi menjadi dua, yaitu partisipasi individu dan partisipasi kolektif. Partisipasi individu ini berupa suara rakyat tentang tuntutan atau keluhan rakyat pada pemerintah contohnya dalam bentuk surat. Sedangkan partisipasi kolektif yaitu suatu kegiatan warga secara serentak dalam kegiatan pemilu untuk memilih salah satu calon pemimpin.

Partisipasi politik yang dikemukakan Maribath dan Goel (dalam Rahman, 2007:289) membedakan menjadi beberapa kategori:

- a) Apatist, adalah orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik
- b) Spectator, adalah orang yang setidak-tidaknya pernah ikut memilih dalam pemilu

- c) Gladiator, adalah mereka yang aktif terlibat dalam proses politik misalnya komunikator, aktifitas partai dan aktifis masyarakat
- d) Pengkritik, adalah orang-orang yang berpartisipasi dalam bentuk yang tidak konvensional.

Rahman (2007:289) konsep partisipasi politik dalam kegiatan politik seperti yang terjadi di beberapa negara dan waktu dapat dibedakan menjadi kegiatan politik dalam bentuk konvensional dan non konvensional, termaksud yang mungkin legal (seperti petisi) maupun illegal, penuh kekerasan, dan revolusioner. Rincian bentuk-bentuk partisipasi politik:

Table 2.1. Bentuk-bentuk partisipasi politik menurut Almond dalam Syarbaini (2002:71)

Konvensional	Non konvensional
Dengan pemberian suara (voting)	Kegiatan pemilu
Dengan diskusi kelompok	Lobby
Dengan kegiatan kampanye	Kegiatan organisasi
Dengan membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan	Contacting
Dengan komunikasi individual dengan pejabat politik/administrative	Tindakan kekerasan

Syuryadi (2007:137) menganalisis bentuk partisipasi politik berdasarkan tingkatan partisipasi politik masyarakat yang membentuk segitiga piramida atau yang dikenal “piramida partisipasi politik”

Gambar 2.1. Piramida partisipasi politik



Sumber: Syarbaini (2002:70)

Kelompok masyarakat pada piramida paling bawah ini adalah kelompok masyarakat yang tidak melakukan kegiatan politik dan sama sekali tidak terlibat dalam kegiatan politik atau biasa disebut sebagai orang yang apolitis. Sedangkan kelompok yang berada di atas apolitis ialah kelompok pengamat, kelompok ini biasanya melakukan kegiatan politik seperti, menjadi anggota partai/kelompok kepentingan, menghadiri rapat umum, mengikuti perkembangan politik, membicarakan masalah politik, mengikuti perkembangan politik melalui media massa dan memberikan suara dalam pemilihan umum. Kemudian kelompok yang berada satu tingkat dari kelompok pengamat adalah kelompok partisipan. Aktivitas yang sering dilakukan oleh kelompok partisipan yaitu menjadi anggota anggota

aktif dari partai/ kelompok kepentingan dan mejadi petugas kampanye. Dan kelompok terakhir adalah kelompok aktivis, terdiri atas pejabat partai sepenuh waktu, pemimpin partai/kelompok kepentingan.

Tingkat pendidikan dan jenis kelamin pemilih pemula merupakan indicator utama yang menjadi dasar tingkat partisipasi politik pemilih pemula. Setiap komonitas masyarakat memiliki latar belakang dan keberanekaragaman, hal ini juga berpengaruh terhadap pemilih pemula.

Budiardjo (1998:47), Berpendapat bahwa partisipasi seseorang itu dipengaruhi oleh status sosial masyarakat dan faktor lingkungan serta keadaan alam sekitar.

Pendidikan tinggi sangat mempengaruhi partisipasi politik, hal ini dikarenakan mampu memberikan pengetahuan politik dan bisa mengembangkan kecakapan menganalisa dan menciptakan minat dan kemamuan berpolitik.

C. Pemilih Pemula

Pengertian pemilih disini adalah seseorang yang memiliki hak pilih sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan sebagai pemilih tetap oleh pemerintah, yang diataranya yaitu telah berusia 17 tahun atau lebih dan merupakan warga negara, tidak berstatus TNI/Polri, terdaftar di DPT, dan Berdomisili 6 (enam) bulan sekurang-kurangnya didaerah pemilu khususnya pilukada.

Hak warga negara dalam hal ini pemilih pemula dalam menggunakan hak pilihnya janganlah sampai tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena beberapa kesalahan sepele diantaranya seorang pemilih yang sudah memilik hak pilihnya

tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena tidak terdaftar di tempat atau daerah pemilihannya, dan kesalahan kesalahan dalam menggunakan hak pilihnya.

Pemilih pemula yang terdiri rentang Umur 17-21 tahun. Pemilih pemula memiliki antusiasme yang tinggi sementara keputusan pilihan yang belum bulat. Pemilih pemula mudah dipengaruhi kepentingan-kepentingan tertentu, terutama oleh orang terdekat seperti anggota keluarga, mulai dari orangtua hingga kerabat dan teman. Selain itu, media masa juga ikut berpengaruh terhadap pilihan pemilih pemula. Hal ini dapat berupa berita di televisi, spanduk, brosur, poster, dan lain-lain.

Pemilih yang memenuhi syarat akan di daftar sebagai pemilih di masukan dalam Daftar Pemilih Tetap atau DPT yang kemudian ditetapkan oleh komisi pemilihan umum (KPU) Pemilih merupakan bagian masyarakat luas yang bisa saja tidak menjadi konstituen partai politik tertentu. Masyarakat terdiri dari beragam kelompok, terdapat kelompok masyarakat yang memang non partisipan, dimana ideology dan tujuan politik mereka tidak dikatakan kepada suatu partai politik tertentu. Mereka menunggu sampai ada satu partai politik yang bisa menawarkan program kerja yang terbaik menurut mereka, sehingga partai tersebutlah yang akan mereka pilih.

Pengertian pemula: Pemula berarti orang yang mulai atau mula-mula melakukan sesuatu: bagi seorang pemula dalam olahraga ski air, meluncur di permukaan air yang berombak akan terasa sulit sekali. Pemula berarti sesuatu yang dipakai untuk memulai.

Pemilih pemula merupakan pemilih yang sangat potensial dalam perolehan suara pada pemilu, mayoritas pemilih pemula memiliki rentang usia 17-21 tahun. Dan mayoritas pemilih pemula merupakan pelajar (SMA), mahasiswa dan pekerja muda. Prilaku pemilih pemula memiliki karakteristik yang biasanya masih labil, dan apatis, kurang dalam pengetahuan politik, cenderung mengikuti kelompok sepermainan. Tempat atau ruang-ruang untuk mempelajari politik biasanya tidak jauh dari ruang yang dapat memberikan rasa nyaman pada diri mereka. Ruang untuk belajar politik tersebut antara lain:

Keluarga merupakan ruang pertama dalam mempelajari politik, di dalam lingkungan keluarga mereka belajar berdemokrasi untuk yang pertama kalinya, faktor keluarga sangat mempengaruhi cara pandang mereka mengenai seluk-beluk kehidupan yang ada di sekitarnya, termasuk pendidikan politik yang pertama kali yang diruang keluarga. Faktor orang tua bisa membentuk prilaku memilih mereka dalam pemilu, sebab keluarga mempunyai kekuatan dalam mempengaruhi secara emosional.

Ruang yang kedua ialah teman sebaya atau pergaulan. Pengaruh teman sebaya atau sepermainan menjadi faktor yang patut dipertimbangkan, karena faktor eksternal ini bisa mempengaruhi informasi dan pendidikan politik. Persepsi atau pengaruh tersebut bisa tindakan positif maupun negatif, sehingga kecenderungan prilaku politiknya berpotensi homogeny dengan prilaku politik teman dekatnya.

Ruang terakhir atau ruang ketiga belajar politik yaitu media massa, media massa terutama televisi, dimana para pemilih pemula menghabiskan waktu berjam-jam untuk menonton acara atau program yang berkaitan dengan politik maupun yang

tidak berkaitan dengan politik. Yang membedakan pemilih pemula dengan kelompok yang lainnya dalam hal ini yang berkaitan dengan pengetahuan politik ialah pengalaman politik dalam menghadapi pemilu. Perilaku pemilih masih erat dengan faktor sosiologis dan psikologis dalam menjustifikasi pilihan politiknya jika ditinjau dari studi voting behaviors, preferensi yang dijadikan sandaran dalam melakukan pemilihan cenderung tidak stabil atau mudah berubah-ubah sesuai dengan informasi atau preferensi yang melingkarnya.

Kecenderungan pemilih pemula yang menjustifikasi pilihan politik yang berdasarkan etnis, popularitas maupun kedekatan emosional maka perlu adanya pendidikan politik yang harus dilakukan oleh pihak terkait guna meningkatkan pengetahuan para pemilih pemula dalam menentukan pilihan berdasarkan rekam jejak, visi misi, kredibilitas dan pengalaman birokrasi.

Salah satu ukuran kualitas demokrasi di suatu negara ialah bagaimana pemilu yang diselenggarakan dan bagaimana bentuk partisipasi para pemilih dalam hal ini pemilih pemula saat sekarang maupun dalam waktu yang akan datang. Peran dari lembaga politik yang dibuat oleh negara maupun lembaga yang ada di masyarakat untuk memberikan wawasan politik dan demokrasi agar para pemilih pemula dapat kritis dan cerdas dalam memilih pemimpin.

2.2. Landasan Teori

A. Pendidikan Politik

Pendidikan politik merupakan usaha sadar yang dilakukan seseorang dalam pengenalan tentang pengetahuan politik di berbagai Lembaga baik intra sekolah

maupun luar sekolah. Hal ini biasanya dilakukan dalam bentuk kegiatan-kegiatan LDK (Latihan Dasar Kepemimpinan), diskusi, dan forum-forum lainnya. Berikut adalah pengertian pendidikan politik menurut para ahli:

1. Surono (dalam Ramdlang, 1982:8) Pendidikan politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
2. Alfian (1990:245-246) mengartikan pendidikan sebagai usaha sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat. Dengan demikian, masyarakat mengalami dan menghayati betul nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik yang ideal yang hendak dibangun. Hasil dari penghayatan akan melahirkan sikap dan prilaku politik baru yang mendukung sistem politik yang ideal tersebut, dan bersama dengan itu lahir pulalah kebudayaan politik baru. Adapun Bentuk-bentuk pendidikan politik sebagai berikut:

- a. Bahan-bahan yang dapat dibaca (*readable legible*) seperti surat kabar, majalah, dan lain-lain yang bersifat umum.
- b. Siaran yang dapat didengar (*audible*) dan televisi seta film yang dapat dilihat dan didengar (bersifat audio-visual),
- c. Lembaga-lembaga, asosiasi-asosiasi dalam masyarakat seperti masjid dan gereja yang menyampaikan khotbah, serta kemungkinan juga melalui pendidikan formal ataupun informal.

B. Partisipasi politik

- a) Partisipasi politik menurut para ahli

1. Mariam Budiardjo (2008:367), Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta dalam kehidupan politik secara aktif, yaitu memilih pemimpin negara baik secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (public policy). Kegiatan ini antara lain memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (*contacting*) atau lobbeyng dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai, atau salah satu gerakan social dengan direct actionnya dan sebagainya.
 2. Herbert McClosky (dalam Miriam, 2008:367), berpendapat bahwa partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum.
 3. Ramlan surbakti (dalam Rahmat, 1998:128) partisipasi politik adalah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya
- b) Bentuk-bentuk partisipasi politik
- Almond (dalam Mas'oe dan MacAndreas 2000:67) Konvensional dan nonkonvensional.
- c) Sifat partisipasi politik
- Huntington dan Nelson (dalam Budiardjo, 2008:370), partisipasi politik bersifat Otonom (Autonomous Participation) yaitu partisipasi politik

didasarkan pada kesadaran politik setiap warga negara untuk menentukan pilihan. Dan mobilisasi partisipasi politik yang bersifat mobilisasi (Mobilized Participation) yaitu partisipasi yang dikerahkan orang pihak.

d) Factor yang mempengaruhi partisipasi politik

Weimer (dalam Sastrododjo, 1995) menyebutkan ada lima factor yang mempengaruhi partisipasi politik.

- 1) Modernisasi
- 2) Terjadinya
- 3) Pengaruh kaum intelektual dan meningkatnya komunikasi masa
- 4) Adanya konflik diantara pemimpin-pemimpin politik
- 5) Adanya keterlibatan pemerintah yang semakin meluas dalam urusan sosial.

C. Pemilih Pemula

Menurut undang-undang no 10 tahun 2008 Bab IV pasal 19 ayat 1 dan 2 serta pasal 20 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pemilih pemula adalah warga Negara Indonesia pada hari pemilihan atau pemungutan suara adalah warga Negara Indonesia yang sudah genap berusia 17 tahun dan atau lebih atau sudah/ pernah kawin yang mempunyai hak pilih, dan sebelumnya belum termasuk pemilih karena ketentuan undang-undang pemilu.

Karim (1991:32) mengemukakan bahwa kaum muda adalah kaum yang sulit didikte, bukan ada dugaan generasi muda merupakan salah satu kelompok yang sulit didekatin partai politik ataupun kontestan pemilu. Pada umumnya pemilih pemula belum memiliki literasi politik yang memadai, pemilih pemula cenderung mengikuti tren di lingkungan tempat tinggalnya. Menurut Suhartono

(2009:26), pemilih pemula khususnya remaja mempunyai nilai kebudayaan yang santai, bebas, dan cenderung pada hal-hal yang informal dan mencari kesenangan, oleh karena itu, semua yang kurang menyenangkan akan dihindari. Disamping mencari kesenangan, kelompok sebaya adalah sesuatu paling penting dalam kehidupan seorang remaja, sehingga bagi seorang remaja perlu mempunyai kelompok teman sendiri dalam pergaulan.

Dasar hukum dimana pemilih pemula untuk menjadi pemilih dalam pemilu di Kabupaten Lembata adalah sesuai Pasal 1 Ayat 25 UU no. 8 tahun 2012 tentang pemilihan umum adalah “warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih”. Pada pasal 19 ayat 2, “warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat 1 didaftar oleh penyelenggara pemilu dalam daftar pemilih.

Berdasarkan hal tersebut dapat dijelaskan bahwa pemilih pemula sudah berumur 17 tahun keatas. Pemilih pemula sudah terdaftar dalam daftar pemilih oleh penyelenggara pemilu. “Pasal 20 UU No. 8 tahun 2012 menegaskan untuk dapat menggunakan hak memilih, warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam Undang-undang ini”.

Pasal ini dapat memberikan sebuah pengertian yang dimaksud pemilih. Pemilih disini merupakan warga Negara Indonesia yang sudah terdaftar sebagai pemilih oleh tim penyelenggara pemilu. Sebagaimana yang sama juga dijelaskan dalam modul KPU “pemilih pemula adalah pemilih yang baru pertama kali akan melakukan penggunaan hak pilihnya”. Pemilih pemula terdiri dari masyarakat

yang telah memenuhi syarat untuk memilih, adapun syarat-syarat yang harus dimiliki untuk menjadikan seseorang dapat memilih adalah:

1. Umur sudah 17 tahun;
2. Sudah/pernah kawin; dan
3. Purnawirawan/sudah tidak lagi menjadi anggota TNI atau Kepolisian.

Modul KPU (Anshari, 2010:48).

Penjelasan dalam modul KPU bahwa pemilih pemula yang diatas umur 17 tahun ke atas mempunyai hak sebagai pemilih. Pemilih pemula bisa dikategorikan sudah pernah menikah atau belum pernah, serta seorang ayah yang jabatan TNI atau Kepolisian sudah pensiun.

2.3. Penelitian Terdahulu

Dalam pembahasan ini peneliti memasukan atau mengangkat kembali beberapa hasil penelitian terdahulu sebagai referensi penulis maupun teori yang dapat digunakan untuk melakukan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Table 2.2 Penelitian Terdahulu

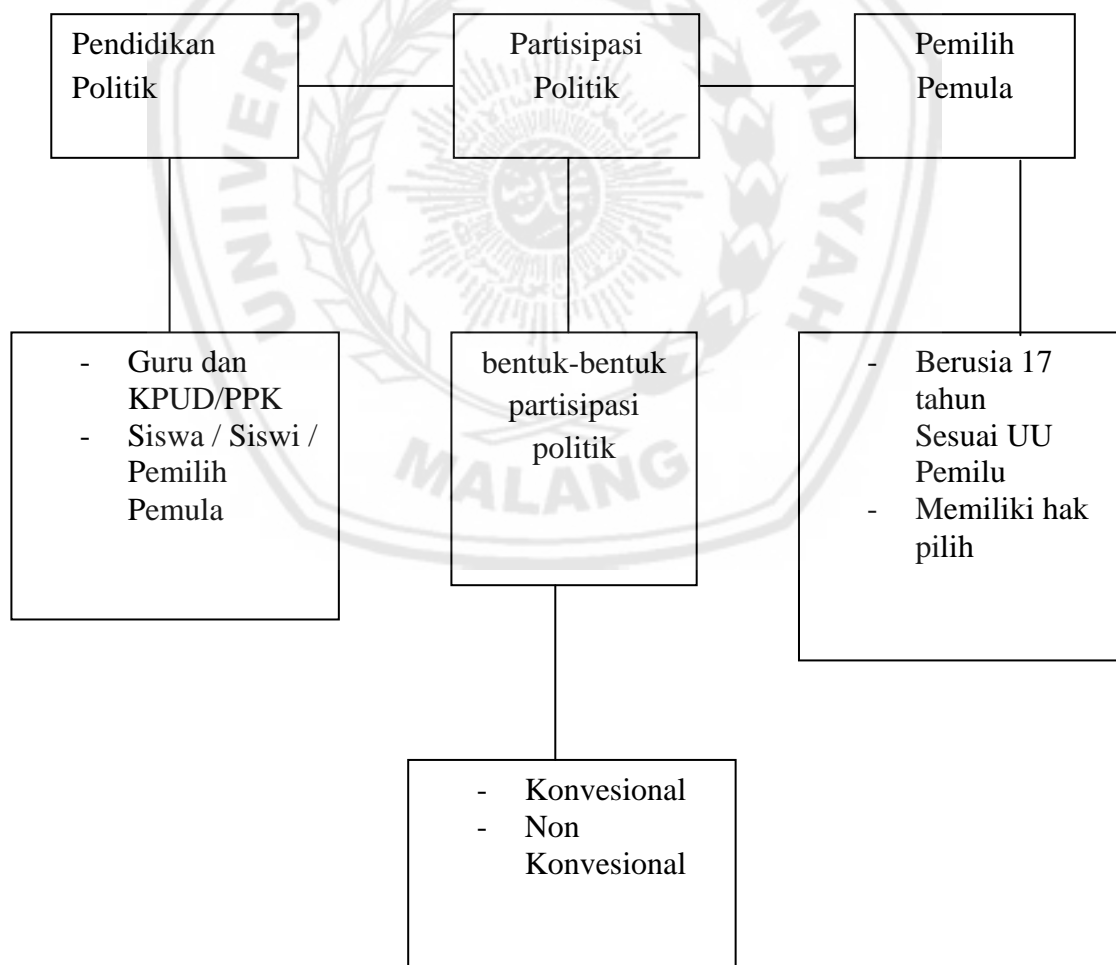
Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Rahmat Budianto, 2014	Pengaruh pendidikan politik terhadap partisipasi masyarakat dalam pemilu tahun 2014 dikelurahan Simpang Pasir, Kecamatan palaran, Kota Samarinda	Diketahui pada variable A scor terendah terdapat pada indikator sikap politik responden sebesar 17 orang yang berkriteria baik, dan scor tertinggi terdapat pada indikator pengetahuan politik responden sebesar 73 orang atau 73.48% masyarakat cukup mengetahui tentang pendidikan politik dengan demikian jumlah masyarakat yang lebih tinggi pada

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
		kriteria cukup memberikan pengaruh terhadap sikap politik masyarakat yang hanya 17.34%
Perbedaan : Penelitian yang dilakukan oleh Rahmat Budianto pada tahun 2014. Meneliti mengenai pengaruh pendidikan politik terhadap partisipasi masyarakat dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif yang berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis yang membahas mengenai analisis dampak pendidikan politik dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula dengan metode penelitian kualitatif.		
Nama Peneliti	Judul penelitian	Hasil penelitian
J.W. Batawi, 2010	Tingkat kesadaran politik pemilih pemula dalam pilkada : <i>suatu refleksi school-based democracy education</i> (studi kasus pilkada Kabupaten Halmahera Timur Propensi Maluku Utara 2010	Tingkat keadaran siswa sebagai pemilih pemula dalam pilkada menunjukkan perbedaan yang beragam didasarkan pada pemahaman dan pengalaman belajar konsep berpolitik di tingkat persekolahan. Pada umumnya pengalaman tersebut didapat dalam sebatas pemilihan ketua OSIS atau pemilihan ketua kelas dan pemilihan lainnya
Perbedaan : Penelitian yang dilakukan oleh J.W. Batawi pada tahun 2010. Penelitian yang dilakukan dengan metode penelitian kuantitatif dengan waktu penelitian yang berbeda dari penelitian yang dilakukan penulis serta menggunakan metode penelitian yang berbeda pula.		
Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Vivaldi E. C. Lasut, 2014	Partisipasi politik pemula pada pemilihan umum legislatif 2014 di Kecamatan Tomohon Utara	Bentuk-bentuk partisipasi politik yang dilakukan oleh pemilih pemula di Kecamatan Tomohon Utara dalam rangka pemilihan umum legislatif 2014 yang pertama adalah berbicara atau berdiskusi tentang masalah dan fenomena-fenomena politik menjelang pemilu legislatif melalui forum-forum informal yaitu diskusi dengan teman-

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
		teman pada saat kumpul-kumpul, dan yang kedua adalah pemberian suara dengan antusiasme untuk datang ke TPS untuk memberikan hak suara
Perbedaan : penelitian yang dilakukan Vivaldi hanya meneliti khusus partisipasi politik pemula yang berbeda dengan penelitian penulis yang membahas mengenai analisis dampak pendidikan politik dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula.		

Sumber : hasil kajian penulis, 2017

2.4. Karangka Konsep



1. Pendidikan Politik

Pendidikan politik merupakan usaha sadar atau pun tidak yang dilakukan secara terencana maupun secara tidak terencana guna meningkatkan kesadaran politik warga negara yang dilandasi oleh nilai-nilai politik yang berdasarkan ideologi nasional. Keberhasilan pendidikan politik yang baik tentu akan melahirkan warga negara atau masyarakat yang baik, yang melek politik yang dapat berpartisipasi di pemilu

Pendidikan politik disini tidak harus dilaksanakan atau dipelajari di sekolah saja (Guru-Siswa). Melainkan juga dapat dilakukan melalui proses sosiologi yang dilakukan oleh dinas yang terkait. Dalam hal ini KPUD/PPK terhadap pemilih pemula (Siswa-siswi) dan dilakukan secara dialogis-interaktif bukan indoktrinaif.

2. Partisipasi Politik

Partisipasi politik merupakan keikutsertaan warga Negara dalam proses politik agar dapat mempengaruhi keputusan kebijakan pemerintah dan ikut menentukan pemimpin Negara.

Adapun bentuk-bentuk partisipasi politik, yaitu:

- a. Konvensional adalah bentuk partisipasi politik berupa, voting, kampanye, membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan
- b. Non Konvensional yaitu demonstrasi, petisi, konfrontasi mogok, tindakan kekerasan terhadap harta benda.

3. Pemilih Pemula

Pemilih pemula adalah warga Negara yang sudah atau telah berusia 17 tahun baik yang sudah kawin maupun belum, pada waktu pemilhan berlangsung pemilih pemula atau warga telah berusia 17 tahun, dan lebih tepatnya sudah diatur dalam UU Pemilu yang sudah dijelaskan diatas.

